

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES

ZULI AGUNG HANA VI IRAWAN

NPP. 31.0489

Asdaf Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 31.0489@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Brebes Regency has experienced a high level of poverty from 2018 to 2022, with a fluctuating number of poor population. Despite the existence of poverty alleviation policies through Regional Regulation Number 2 of 2018, the poverty rate remains unstable. **Purpose:** This research aims to describe and analyze the effectiveness of poverty alleviation policy implementation in Brebes Regency, as well as identify the factors influencing its effectiveness. **Method:** The method employed is qualitative, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings indicate that the Brebes Regency government has implemented policies effectively, including programs like PKH, PIP, and village fund assistance to tackle poverty. **Conclusion:** Overall, the government's poverty alleviation policies have not been effective in resolving the issue of poverty; instead, they have exacerbated the situation by adding to the number of new poor individuals due to misdirected distribution and the entrenched culture of poverty within society.

Keywords: Effectiveness, Policy Implementation, Poverty Alleviation

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kabupaten Brebes mengalami tingkat kemiskinan tinggi dari 2018 hingga 2022, dengan jumlah penduduk miskin yang fluktuatif. Meskipun telah ada kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, tingkat kemiskinan tetap tidak stabil. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes telah menjalankan kebijakan dengan tepat, termasuk melalui program-program seperti PKH, PIP, dan bantuan dana desa untuk menanggulangi kemiskinan. **Kesimpulan:** Menilai efektivitasnya secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan justru sebaliknya menambah masyarakat miskin baru dikarenakan penyaluran yang tidak tepat sasaran dan budaya miskin yang sudah tertanam di masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi kekurangan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menjadikan masyarakat dalam keadaan yang tidak mampu menempuh pendidikan serta kesehatan yang baik (Sadiman et al., 2019). Permasalahan kemiskinan terutama di Indonesia, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2018, mencapai 25,67 juta orang, mengalami penurunan pada September 2019 menjadi 24,78 juta orang, namun kembali meningkat pada September 2020 menjadi 27,55 juta orang. Pada September 2021, terjadi penurunan kembali menjadi 26,50 juta orang, namun pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023). Secara bersamaan, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin yang mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018, terdapat 3,897,20 ribu jiwa penduduk miskin di Jawa Tengah, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 3,743,23 ribu jiwa. Namun, terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2020 mencapai 3,980,90 ribu jiwa, yang terus meningkat pada 2021 menjadi 4,109,75 ribu jiwa, meskipun mengalami penurunan pada 2022 hingga mencapai 3,831,44 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Berikut tabel yang menampilkan data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2018	3,897,20	11,32
2019	3,743,23	10,80
2020	3,980,90	11,41
2021	4,109,75	11,79
2022	3,831,44	10,93

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan tabel persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama periode 2018-2022. Mulai dari 11,32% pada tahun 2018, turun menjadi 10,80% pada 2019, naik kembali menjadi 11,41% pada 2020, mencapai puncak 11,79% pada 2021, dan mengalami penurunan menjadi 10,93% pada 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Brebes telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Menurut pasal 1 ayat 8 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, 2018). Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan (Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, 2018). Terdapat empat program dalam penanggulangan kemiskinan yang akan di tampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan

No.	Nama Program	Tujuan Program
1.	Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga	Untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
2.	Pemberdayaan masyarakat	Untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

		pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3.	Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	Untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
4.	Program lainnya	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Sumber : (Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, 2018)

Berdasarkan tabel Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah mengupayakan mengatasi masalah kemiskinan yang dibuktikan dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi belum berjalan dengan baik karena komunikasi antara Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Cipayang belum terkoordinasi dan belum dilaksanakan serta belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

Azhara, R. (2016). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya sesuai fokus penelitian yang berhubungan dengan konten dan konteks kebijakan sebagai salah satu faktor dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Suryana, S., & Rendeo, H. HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan P2KP sebesar 0.393 atau 39,30 % dan Koordinasi memberikan kontribusi sebesar 0,563 atau 56,300%. Sedangkan pengaruh secara simultan Implementasi Kebijakan dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,835 atau 83,50% sedangkan sisanya sebesar 14,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas otonomi daerah di Bandung Barat dalam mengurangi kemiskinan. Bentuk otonomi daerah untuk Kabupaten Bandung Barat belum mengurangi kemiskinan secara signifikan, termasuk banyaknya jalan rusak, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurang responsif terhadap penanggulangan bencana. Akibatnya, perekonomian Bandung Barat lemah menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

Hamin, K., St K, O., & Selanno, H. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon telah dielaborasi melalui berbagai program kerja dan dibuat berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran dan pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah terkait; (2)

Implementasi kebijakan penanganan kemiskinan belum maksimal dari segi akurasi kebijakan, akurasi pelaksanaan, akurasi sasaran, akurasi lingkungan hidup dan akurasi proses.

Satibi, I., & Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada hasil benchmarking.

Fauziah, A. C., Nur, T., & Sampurna, R. H. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa 52,4% efektivitas penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dan dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima, ini artinya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik sehingga terlihat adanya efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Muhaimin, M. (2012). Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya. Hasilnya, pertama: implementasi kebijakan pemerintah masih belum efektif, karena faktor internal yaitu budaya dan tingkat pendidikan yang rendah dan faktor eksternal seperti tidak adanya data dan pemetaan yang valid tentang profil kemiskinan, serta kebijakan dan undang-undang pemerintah yang komprehensif dan spesifik.

Taufik, M., Sugiarto, I., & Pratama, E. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal. Keberhasilan dan efektivitas program kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan data dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program, dalam hal ini peran dinas yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan maksimal jika dibuat Peraturan Daerah sebagai Individual Norma dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.

Juanda, M. P. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung*. penelitian ini menghasilkan kajian serta analisis implementasi P2KP dan strategi efektivitas implementasi P2KP di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

II. METODE

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diteripakn peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari peneltian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah berupa pertanyaan yang ada pada bab 1 yaitu bagaimana efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dan apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori efektivitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yang terdiri dari 5 Dimensi yaitu:

1. Ketepatan kebijakan
Dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dibuat memuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai karakter kebijakan.
2. Ketepatan pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, tetapi ada aktor lain yaitu masyarakat dan swasta.

3. Ketepatan target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan lain, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan lingkungan

Lingkungan kebijakan (interaksi lembaga perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait) dan lingkungan eksternal kebijakan (*public opinion*, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan).

5. Ketepatan proses

Policy acceptance (penerimaan kebijakan), *policy adoption* (adopsi kebijakan), dan *strategic readiness* (kesiapan strategis).

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Keterbatasan dana untuk memberantas kemiskinan merupakan faktor paling dominan dalam terhambatnya upaya yang dilakukan pemerintah. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan dari Juanda, M. P. (2017) yang sama-sama terhambat oleh keterbatasan dana dari pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dan faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam menghadapi faktor penghambat. Menunjukkan bahwa: Efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dapat dinilai dari beberapa aspek, yang mencakup ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. Dalam hal ini, terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi landasan kebijakan. Namun, untuk menilai efektivitasnya secara keseluruhan, perlu diperhatikan juga sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan penanggulangan kemiskinan yang dijelaskan dalam Perda tersebut.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bapedalitbang Kabupaten Brebes beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azhara, R. (2016). *Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UNPAS). [STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA - repo unpas](#)
- Fauziah, A. C., Nur, T., & Sampurna, R. H. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 222-235. [PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI | Fauziah | Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara \(unigal.ac.id\)](#)
- Hamin, K., St K, O., & Selanno, H. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2053-2059. [Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon | Hamin | JISIP \(Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan\) \(mandalanursa.org\)](#)
- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 108-126. [EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI BANDUNG BARAT TAHUN 2019 | JDP \(JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN\) \(univrab.ac.id\)](#)
- Juanda, M. P. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UNPAS). [IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN \(P2KP\) DI KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG - repo unpas](#)
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, M. (2012). Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 15-26. [ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MODEL PENYELESAIANNYA | Muhaimin | Jurnal Dinamika Hukum \(unsoed.ac.id\)](#)
- Sadiman, Pachrozi, I., & Samsudin, H. (2019). *Kajian Sosial Menuju Kemiskinan Satu Digit* (S. Franeka (ed.)). Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Satibi, I., & Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 362-381. [STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA | Satibi | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik \(uinsgd.ac.id\)](#)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318-327. [Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten](#)

[Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan \(peneliti.net\)](#)

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.

Suryana, S., & Rendeo, H. HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 10(2). [HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN \(Studi Pada Bidang Prasarana Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat\) | Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi \(unnur.ac.id\)](#)

Taufik, M., Sugiarto, I., & Pratama, E. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 58-77. [Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal | Diktum: Jurnal Ilmu Hukum \(upstegal.ac.id\)](#)

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Web

Badan Pusat Statistik. (2023a). *Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>